

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, Kinerja pengawasan pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan RS DKT yang dilaksanakan oleh BPPLH Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal hal ini terlihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu:

- a. Produktivitas Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat dipahami sebagai ratio input dan output, berikut kesimpulannya dapat dilihat dibawah ini:

1. Input

- a. Input dalam kegiatan pengawasan pengelolaan limbah medis padat belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari minimnya jumlah pegawai, kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, minimnya dana atau biaya anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
- b. Output BPPLH Kota Bandar Lampung dapat terlihat dari pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan RS DKT, kegiatan pengawasan tersebut belum mampu menekan tingkat ketaatan administrasi perizinan pengelolaan limbah medis padat

RSUDAM dan RS DKT. Sampai saat ini prosedur pengelolaan limbah medis padat rumah sakit tersebut terus dilaksanakan dan masih terjadi pencemaran lingkungan disekitar lingkungan masyarakat. Hal ini karena kurangnya ketegasan dari BPPLH Kota Bandar Lampung dan rendahnya pengetahuan oknum rumah sakit dalam prosedur pengelolaan limbah medis padatnya seperti apa.

- b. Kualitas Layanan BPPLH Kota Bandar Lampung dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait tata cara pengaduan pencemaran lingkungan masih rendah, Hal ini terlihat dari keluhan masyarakat yang belum mengerti tentang tata cara pengaduan pencemaran lingkungan seperti masih ditemukannya limbah medis padat yang belum sesuai dengan prosedur pengelolaannya oleh rumah sakit yang bersangkutan. Oleh karena itu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap masyarakat masih rendah.
- c. Responsivitas BPPLH Kota Bandar Lampung dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan izin administrasi pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan RS DKT terdapat kendala bahwa rumah sakit tersebut belum taat dalam perizinan administrasi pengelolaan limbah medis padat. Kegiatan pemeriksaan tersebut semata-mata untuk kebutuhan masyarakat supaya bebas dari pencemaran lingkungan namun kenyataanya masih terdapat limbah medis padat yang ditemukan di tempat pembuangan sampah.
- d. Responsibilitas BPPLH Kota Bandar Lampung dalam kegiatan pengawasan pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan RS DKT belum sesuai dengan prinsip prinsip administrasi birokrasi publik. Hal ini dapat dilihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didalamnya terdapat dasar hukum

yang dilaksanakan belum berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan BPPLH Kota Bandar Lampung.

- e. Akuntabilitas BPPLH Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data di lapangan menunjukkan bahwa rencana kerja dengan hasil kerja BPPLH Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Faktor-faktor penghambat kinerja pengawasan pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan RS DKT oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

- a. Internal

Terbatasnya sumber daya manusia dan kompetensi yang dimiliki di bidang pengawasan dampak lingkungan dan penegak hukum lingkungan hidup BPPLH Kota Bandar Lampung, dana atau anggaran biaya yang masih minim, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

- b. Eksternal

Kurangnya sosialisasi dan pembinaan BPPLH Kota Bandar Lampung terhadap masyarakat dan personil rumah sakit terkait, sehingga peran serta masyarakat dan partisipasi RSUDAM dan RS DKT masih kurang dalam membantu kegiatan pengawasan pengelolaan limbah medis padat.

## Saran

1. BPPLH Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerja yaitu diperlukannya penambahan pegawai dan penyeleksian pegawai yang kompeten sehingga mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing.
2. Untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan RS DKT yang dilaksanakan oleh BPPLH Kota Bandar Lampung, diperlukan dana yang memadai untuk biaya operasional kegiatan pengawasan limbah medis padat yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
3. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana dibidang pengawasan dampak lingkungan hidup dan penegak hukum lingkungan hidup BPPLH Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan motivasi kinerja.
4. Diperlukannya kesadaran kepada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Rumah sakit DKT harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup dalam rangka ketertiban administrasi dalam hal perizinan pengelolaan limbah medis padat.
5. Diperlukannya ketegasan BPPLH Kota Bandar Lampung dalam menyikapi masalah yang ada dilapangan seperti ditemukannya limbah medis padat di TPS sekitar lingkungan masyarakat. Sehingga rumah sakit yang bersangkutan tidak lagi melakukan kesalahan secara terus menerus.
6. BPPLH Kota Bandar Lampung seharusnya lebih sering terjun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan menanyakan keadaan lingkungan sekitar sudah bersih atau sebaliknya dari limbah medis padat.

7. Diperlukan Sosialisasi dan pembinaan dari tim pengawas BPPLH dalam melakukan kegiatan pengawasan, sehingga oknum dari rumah sakit dan masyarakat sekitar mengerti bahayanya akan limbah medis padat jika pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Jika ada kasus tentang pengelolaan limbah medis padatnya tidak sesuai diharapkan masyarakat ikut membantu tim pengawas BPPLH.
8. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan maka diperlukan rencana kegiatan dengan cara merahasiakan kegiatan pengawasan tersebut ke sejumlah rumah sakit terkait, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan visi misi yang ingin di capai.